



KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

POPULATION AND EMPLOYMENT ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

Nikmatul Mukaromah¹, Shilfarihah Hasanah², Firli Fachrezi Yansyah³,
Dan Heni Noviarita⁴

^{1,2,3,4}Ekonomi Sayariah, Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

Email : Nikmatulmukaromah113@gmail.com¹, shilfarihahhasanah@gmail.com², firlifachrezi@gmail.com³,
heninoviarta@radenintan.ac.id⁴

Article history :

Abstract

Received : 30-11-2024
Revised : 02-12-2024
Accepted : 04-12-2024
Published: 06-12-2024

Population and employment are intrinsically linked, as they represent fundamental components of economic dynamics. Factors such as the age structure of the population, urbanization, educational attainment, migration patterns, and income distribution significantly impact the labor market within a country or region. A demographic profile characterized by a substantial working-age population indicates considerable labor potential; however, the educational qualifications and skills of this workforce are crucial in determining the types of employment opportunities available and the corresponding income levels. This study employs a literature review methodology, which systematically identifies, evaluates, and synthesizes findings and perspectives from various researchers and practitioners. The insights gained from this research underscore the necessity of comprehensively understanding these two dimensions to develop effective and sustainable policy frameworks. According to the Indonesian Central Statistics Agency (BPS) in 2024, Indonesia's population stands at 281.6 million, positioning it as the fourth most populous nation in Asia. This demographic analysis encompasses the quantity, composition, and distribution of the population within specific regions, addressing aspects such as population growth, age distribution, and migration trends.

Keywords : Population, Employment, and Economic Growth

Abstrak

Kependudukan dan lapangan kerja pada dasarnya saling terkait karena keduanya merupakan komponen fundamental dalam dinamika perekonomian. Faktor-faktor seperti struktur usia penduduk, urbanisasi, pencapaian pendidikan, pola migrasi, dan distribusi pendapatan berdampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja di suatu negara atau wilayah. Profil demografis yang ditandai dengan banyaknya populasi usia kerja menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar; namun demikian, kualifikasi pendidikan dan keterampilan tenaga kerja ini sangat penting dalam menentukan jenis peluang kerja yang tersedia dan tingkat pendapatan yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur, yang secara sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dan perspektif dari berbagai peneliti dan praktisi. Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya pemahaman komprehensif terhadap



kedua dimensi tersebut untuk mengembangkan kerangka kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 281,6 juta jiwa, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Asia menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 281,6 juta jiwa, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Asia. Hal ini meliputi jumlah, komposisi, dan sebaran penduduk di berbagai wilayah. Analisis. Analisis demografi ini mencakup kuantitas, komposisi, dan sebaran penduduk di wilayah tertentu, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti pertumbuhan penduduk, sebaran umur, dan tren migrasi.

Kata Kunci : Kependudukan, Ketenagakerjaan, dan Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Kependudukan dan lapangan kerja merupakan dua landasan penting bagi pembangunan suatu bangsa. Unsur-unsur tersebut saling terkait dan berdampak signifikan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor tersebut sangat penting untuk tersebut mencakup faktor demografi seperti pertumbuhan penduduk, distribusi umur, dan pola migrasi. Di Indonesia, kependudukan dan ketenagakerjaan merupakan permasalahan penting yang saling terkait erat, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan nasional. Keberagaman demografis negara ini, yang ditandai dengan beragamnya etnis, budaya, dan agama, menambah dimensi unik pada dinamika sosial dan ekonomi negara tersebut. Meskipun pertumbuhan penduduk yang pesat menawarkan potensi besar bagi angkatan kerja, hal ini juga menimbulkan tantangan besar dalam menciptakan peluang kerja yang memadai.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan rumit dalam sektor ketenagakerjaan. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya potensi pengembangan industri produktif, isu-isu seperti kemiskinan dan prevalensi lapangan kerja informal masih menimbulkan kekhawatiran yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan terbuka; namun, demografi generasi muda, khususnya lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, terkena dampak yang sangat besar. Pertimbangan ketenagakerjaan meliputi ketersediaan lapangan kerja, kualitas angkatan kerja, dan tingkat pengangguran. Tingkat lapangan kerja yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai indikator vitalitas perekonomian suatu negara tetapi juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Memastikan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan standar hidup. Namun demikian, praktik ketenagakerjaan yang tidak diatur dapat menimbulkan tantangan seperti pengangguran struktural dan ketidakpuasan sosial. Masalah-masalah ini saling berhubungan; pertumbuhan penduduk yang pesat, jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, dapat memperburuk pengangguran dan keresahan sosial. Sebaliknya, ekspansi ekonomi yang cepat dapat mendorong migrasi dari daerah lain, sehingga memerlukan pengelolaan yang efektif untuk menghindari potensi masalah sosial.



METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metodologi tinjauan literatur untuk penelitian ini. Tinjauan literatur berfungsi sebagai pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengintegrasikan temuan dan perspektif dari berbagai peneliti dan praktisi. Peneliti mengumpulkan informasi dengan cara menelaah dan mereferensikan jurnal, buku, modul, dan sumber lain yang relevan, termasuk materi online, yang berkaitan dengan pengembangan penelitian ini. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman terkait kependudukan dan ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia untuk sementara waktu. Konsep kependudukan mencakup berbagai aspek, termasuk ukuran numerik, struktur demografi, distribusi usia, jenis kelamin, afiliasi agama, angka kelahiran, tren pernikahan, statistik kehamilan, angka kematian, distribusi geografis, pola mobilitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan, serta ketahanan dalam kaitannya dengan faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Data kependudukan yang akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif. Ketepatan dan kelengkapan data kependudukan yang tersedia secara langsung mempengaruhi keakuratan strategi pembangunan. Pengelolaan penduduk dan pembangunan keluarga merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengarahkan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mencapai ekspansi demografi yang seimbang dan meningkatkan kualitas hidup di semua dimensi penduduk (Gatiningsih dan Sutrisno, 2017).

Perkembangan kependudukan berkaitan dengan dinamika kondisi demografi yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian pembangunan berkelanjutan. Istilah "populasi" mencakup kuantitas dan atribut individu yang tinggal di wilayah, negara, atau wilayah tertentu selama jangka waktu tertentu. Konsep ini mencakup berbagai dimensi seperti jumlah penduduk, distribusi umur, rasio gender, angka kelahiran dan kematian, pola migrasi, tren urbanisasi, dan penyebaran geografis penduduk. Lebih jauh lagi, definisi populasi juga mencakup pemeriksaan tentang bagaimana elemen-elemen demografis berinteraksi dan dibentuk oleh konteks ekonomi, sosial, dan politik. Ketenagakerjaan, dalam konteks ini, mengacu pada jumlah dan karakteristik individu yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, yang mencakup mereka yang saat ini bekerja, sedang aktif mencari pekerjaan, atau memiliki potensi untuk bekerja dalam suatu populasi atau wilayah tertentu (Nursani et al., 2024).

Ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam perekonomian karena sangat terkait dengan produktivitas, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini mencakup penduduk usia kerja yang siap untuk melakukan pekerjaan, yang mencakup individu yang saat ini bekerja, mereka yang mencari pekerjaan, pelajar, dan individu yang menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Statistik ketenagakerjaan sangat penting untuk memahami pertumbuhan ekonomi; tanpa data tersebut, merancang dan melaksanakan inisiatif



pertumbuhan ekonomi akan menjadi tantangan. Yang dimaksud dengan “pekerja” adalah semua orang yang bersedia dan mampu bekerja, termasuk mereka yang menganggur namun siap bekerja dan mereka yang menganggur karena terbatasnya kesempatan kerja. Sebaliknya, angkatan kerja terdiri atas individu-individu yang bekerja, baik aktif bekerja maupun berhalangan sementara karena berbagai sebab, seperti petani menunggu panen atau hujan, dan karyawan yang sedang cuti atau sakit. (Seran S., 2023). manual

Dalam definisi di atas, terdapat keterkaitan antara kependudukan dan lapangan kerja, yang merupakan elemen penting dalam bidang perekonomian. Faktor-faktor seperti struktur usia penduduk, urbanisasi, pendidikan, migrasi, dan distribusi pendapatan berdampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja suatu negara atau wilayah. Misalnya saja, demografi yang dicirikan oleh sebagian besar penduduk usia kerja mempunyai potensi tenaga kerja yang besar; namun, tingkat pendidikan dan kualifikasi para pekerja juga penting dalam menentukan jenis pekerjaan yang tersedia dan pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, urbanisasi juga mempengaruhi ketersediaan kesempatan kerja, sementara migrasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja.

2. pertumbuhan

Pertumbuhan adalah proses yang disengaja dan berkelanjutan yang mencakup berbagai dimensi kehidupan individu. Pertumbuhan ekonomi merupakan contoh utama dampak kebijakan pembangunan, khususnya di sektor perekonomian (Lestari et al., 2021). Bidang ekonomi berfokus pada analisis tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dan mengidentifikasi strategi untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga memfasilitasi kemajuan ekonomi yang lebih cepat bagi negara-negara tersebut (Ifan Arbiansa, 2008). Pembangunan mengacu pada inisiatif apa pun yang bertujuan untuk mendorong transformasi sosial yang signifikan, mentransisikan suatu bangsa dari kondisi saat ini ke kondisi yang lebih baik (Cahyani et al., 2021). Pada dasarnya, pembangunan merupakan perjalanan transformatif bagi masyarakat menuju pencapaian model tatanan sosial yang diimpikan sebagaimana diartikulasikan dalam konstitusi. Proses pembangunan infrastruktur diawali dengan lahirnya ide-ide pembangunan. Ide-ide tersebut selanjutnya disempurnakan menjadi konsep pembangunan yang komprehensif, dirumuskan menjadi program pembangunan, dan dilaksanakan. Sepanjang tahap implementasi, pemantauan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan sejalan dengan program yang telah ditetapkan dan infrastruktur dikembangkan sesuai dengan kebutuhan regional. Pembangunan memegang peranan penting dalam memperkuat pertahanan dan keamanan negara (Utami et al., 2021). Berikut beberapa rencana dan program strategis yang dapat dimanfaatkan Bappeda untuk meningkatkan infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi:

a. Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta

Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berupaya untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah, khususnya dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin berdampak buruk pada infrastruktur seperti



jalan, jembatan, dan kemacetan lalu lintas. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan swasta ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan perumusan peraturan yang mengatur mekanisme kerja sama CSR, dilanjutkan dengan upaya sosialisasi untuk mengedukasi pemangku kepentingan mengenai peraturan tersebut.

b. Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat

Kebijakan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilaksanakan di semua tingkatan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberhasilan investasi infrastruktur bergantung pada hubungan sinergis antara inisiatif pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk mengembangkan program investasi infrastruktur yang responsif dan partisipatif. Dua program potensial dapat dimulai. Salah satu program tersebut melibatkan pemanfaatan media sosial untuk hubungan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas departemen hubungan masyarakat dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, menanggapi umpan balik, dan mengelola kritik. Penting untuk membina organisasi masyarakat yang memfasilitasi jasa konstruksi, melibatkan masyarakat umum, akademisi, pemasok, dan entitas terkait lainnya.

c. Kolaborasi antar instansi pemerintah dapat dicapai secara efektif melalui pelaksanaan program pertemuan triwulanan.

Pertemuan-pertemuan ini dirancang untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul antar lembaga mengenai investasi infrastruktur regional. Inisiatif-inisiatif tersebut diharapkan dapat memitigasi potensi permasalahan dan mempercepat penyelesaian tantangan-tantangan yang ada. Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertugas melakukan perencanaan pembangunan mempunyai peranan penting dalam mengkoordinasikan upaya-upaya tersebut di tingkat daerah.

Dalam proses transformasi, penting untuk fokus pada dua aspek utama: keberlanjutan dan perubahan. Pembangunan adalah proses yang kompleks dan multidimensi yang mencakup perubahan signifikan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Dalam bidang ekonomi pembangunan, diakui secara luas bahwa terdapat trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan. Ketika program pembangunan mengutamakan pertumbuhan ekonomi, seringkali dampaknya adalah tingginya tingkat pertumbuhan yang tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan sehingga menimbulkan ketimpangan. Sebaliknya, jika fokus beralih ke program pemerataan, distribusi pendapatan mungkin menjadi lebih adil, namun pertumbuhan ekonomi mungkin mengalami penurunan.

Dimana Pendapatan mengacu pada jumlah total uang yang dikeluarkan oleh suatu rumah tangga selama jangka waktu tertentu tanpa mengubah aset bersihnya. Pendapatan tersebut dapat diperoleh dari upah atau gaji, maupun dari sumber non-upah atau non-gaji. Pendapatan permanen cenderung meningkat ketika individu merasakan peningkatan kualitas hidup mereka dan mampu bersaing secara efektif di pasar, bahkan ketika pendapatan mereka



masih lebih rendah dibandingkan pendapatan karyawan. Sebaliknya, pengusaha yang terintegrasi umumnya mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kedua kelompok tersebut (Heni Noviarita dkk, 2021).

Beberapa faktor secara signifikan mempengaruhi pendapatan, antara lain:

- a. Modal, yang terdiri dari barang-barang tahan lama yang diproduksi dan dapat dijadikan sebagai input produktif untuk produksi selanjutnya.
- b. Umur panjang usaha, yaitu jangka waktu sejak berdirinya usaha dagang tersebut.
- c. Lokasi, yang berkaitan dengan letak geografis usaha pedagang, merupakan aspek penting karena mempengaruhi langsung penghidupan mereka.

3. Peran kependudukan dan ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Peningkatan pertumbuhan penduduk dapat menjadi katalisator ekspansi ekonomi. Populasi yang lebih besar berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Spesialisasi ini mengarah pada peningkatan aktivitas ekonomi. Kehadiran spesialisasi dan pembagian kerja di antara angkatan kerja semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong kemajuan teknologi. Namun, tantangan muncul sehubungan dengan kepadatan penduduk, khususnya distribusi yang tidak merata. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap kualitas hidup penduduknya. Di daerah padat penduduk, inisiatif yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan menjadi semakin menantang, sehingga menimbulkan permasalahan sosial-ekonomi terkait kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, dan akses terhadap air bersih dan makanan. Dampak paling signifikan dari tantangan-tantangan ini adalah degradasi lingkungan. Segala kebutuhan manusia bersumber dari lingkungan yang berfungsi sebagai sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kebutuhan, antara lain pangan, papan, air bersih, udara bersih, dan kebutuhan penting lainnya.

Berbagai faktor mempengaruhi distribusi pendapatan, sehingga menyebabkan perbedaan jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga dalam jangka waktu tertentu, yang selanjutnya dapat mempengaruhi aset bersih mereka. Menurut Kasus dan Fakta, pendapatan seseorang terutama berasal dari tiga sumber: upah atau gaji yang diperoleh sebagai kompensasi tenaga kerja, yang dipengaruhi oleh kesenjangan ekonomi dalam suatu populasi. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang hak kepemilikan dan kaitannya dengan dinamika populasi dan lapangan kerja sangat penting untuk perencanaan ekonomi yang efektif, pembuatan kebijakan, dan mengatasi kompleksitas tantangan ekonomi yang terus berkembang. Pendapatan pada dasarnya bersumber dari upah atau gaji, dan peningkatan pendapatan permanen dapat terjadi ketika individu merasakan peningkatan kualitas diri mereka, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar (Indriani, 2016).



4. Kualitas Dan Komposisi Penduduk dalam pertumbuhan ekonomi

Kualitas penduduk mengacu pada kondisi suatu penduduk secara keseluruhan, baik yang mencakup dimensi fisik maupun non fisik. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, status sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan, yang berfungsi sebagai langkah mendasar untuk meningkatkan kemampuan dan menjalani kehidupan yang memuaskan sebagai individu yang berbakti, berbudaya, dan bertanggung jawab secara sosial. Kualitas penduduk dapat ditingkatkan secara signifikan, menjadi bukti keberhasilan pembangunan dan bertindak sebagai indikator kemajuan masyarakat atau nasional. Proses identifikasi indikator kualitas penduduk sedang berlangsung dan dipandang sebagai cerminan kemajuan masyarakat secara holistik. Setiap negara mempunyai otonomi untuk menetapkan indikator kualitas penduduk yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, penting untuk mengembangkan indikator kualitas penduduk yang lebih sesuai dengan kondisi unik masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan demografi pertaniannya (Pranadji et al., 2013).

Dalam masyarakat masa kini, kualitas penduduk memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan nasional. Kependudukan yang bercirikan kualitas tinggi dapat memfasilitasi proses pembangunan yang cepat dan efektif. Untuk meningkatkan kualitas penduduk, berbagai inisiatif harus dilakukan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat meliputi penyediaan layanan kesehatan esensial bagi mereka yang membutuhkan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pelayanan terhadap ibu hamil dan ibu saat melahirkan, serta pelayanan terhadap bayi dan anak kecil. Selain itu, layanan kesehatan mendasar lainnya juga tersedia (CENDEKIA Jaya & Harjanto, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan di tingkat nasional dan regional, sekaligus mendorong pengakuan hak-hak penduduk dan perlindungan sosial melalui:

- a. Melakukan analisis terhadap data kependudukan yang diperoleh dari sensus dan survei.
- b. Meningkatkan kualitas data dan informasi terkait perkembangan kependudukan dan penyelenggaraan keluarga berencana dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Membangun jaringan untuk menghubungkan data kependudukan.
- d. Menganalisis dan mempelajari kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk.

Komposisi penduduk mengacu pada kategorisasi berdasarkan kriteria tertentu, seperti faktor geografis, biologis, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks demografi, komposisi penduduk ditentukan oleh sebaran usia dan jenis kelamin. Kedua variabel ini berdampak signifikan terhadap pertumbuhan populasi di masa depan. Pentingnya hal ini tidak dapat diremehkan, karena hal ini sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan kependudukan di masa depan. (Kisno., 2021). Mereka akan tinggal bersama untuk beberapa tahun yang akan datang.

**Dampak Kepadatan Penduduk:**

- a. Ketersediaan udara bersih
- b. Ketersediaan pangan
- c. Ketersediaan lahan
- d. Ketersediaan air bersih

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah total jumlah penduduk suatu wilayah pertotal luas lahan (km²). Kepadatan penduduk ini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km² dalam suatu wilayah.

Perhitungan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kepadatan Penduduk Aritmatik (Kasar) Kepadatan penduduk aritmatik adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan seluruh luas wilayah. Oleh karena itu kepadatan penduduk ini dikatakan sangat kasar, baik tempat yang dapat dihuni maupun tidak dapat dihuni disamakan/dihitung. Kepadatan penduduk ini diperoleh dengan rumus:

Kepadatan penduduk kasar :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{Luas lahan (Km}^2\text{)}}$$

- b. Kepadatan Penduduk Fisiologis Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas lahan pertanian. Kepadatan jenis ini biasanya untuk mengukur kemampuan produksi pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kepadatan penduduk ini diperoleh dengan rumus:

Kepadatan fisiologis :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{Luas lahan pertanian (Km}^2\text{)}}$$

- c. Kepadatan dapat diklasifikasikan minimal menjadi tiga macam yakni tenaga kerja terdidik (skill labour), tenaga kerja terlatih (trainer labour), tenaga kerja tidak terlatih (unskill labour).

5. Manfaat Mempelajari Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Kependudukan menghadirkan tantangan multifaset yang mencakup berbagai dimensi, termasuk kekuatan numerik, struktur demografi, distribusi usia, komposisi gender, afiliasi keagamaan, angka kelahiran, pola perkawinan, statistik kehamilan, angka kematian, distribusi spasial, mobilitas, kualitas hidup, dan ketahanan. Kesemuanya terkait dengan unsur spiritualitas, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam ranah perencanaan pembangunan, analisis data kependudukan merupakan hal yang sangat penting. Tenaga kerja merupakan komponen penting dalam proses produksi, yang berfungsi sebagai kunci fundamental untuk mencapai hasil yang sukses. Signifikansinya melampaui bahan mentah, sumber daya alam, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi. Dalam kerangka produksi, peran tenaga kerja sangat diperlukan jika dibandingkan dengan sumber daya lain seperti bahan baku, tanah, dan air. Studi tentang kependudukan dan tenaga kerja menghasilkan beberapa keuntungan, antara lain:



- a. Menganalisis kuantitas dan sebaran penduduk dan tenaga kerja dalam suatu wilayah tertentu.
- b. Mengkaji tren historis pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, serta distribusinya berdasarkan data yang tersedia.
- c. Membangun hubungan sebab akibat antara dinamika kependudukan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.
- d. Memproyeksikan tren pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja di masa depan, beserta potensi dampaknya.

Dengan Mengintegrasikan pertimbangan kependudukan ke dalam strategi ekonomi dan pembangunan nasional akan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan melalui perluasan angkatan kerja. Pendekatan ini akan memfasilitasi pencapaian tujuan pertumbuhan penduduk secara lebih efisien, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks perencanaan pembangunan, data kependudukan sangatlah penting. Tersedianya data kependudukan yang komprehensif dan tepat mempermudah dan memperjelas proses perencanaan pembangunan. Misalnya, dalam perencanaan pendidikan, penting untuk memiliki data mengenai jumlah individu usia sekolah, sementara para profesional kesehatan masyarakat memerlukan informasi mengenai angka kematian dan kesakitan dalam suatu populasi. Ada banyak contoh lain dimana data kependudukan sangat penting untuk perencanaan pertumbuhan yang efektif (Retno Setyowati et al., 2019).

6. Masalah Pokok Ketenagakerjaan Di Indonesia

Masalah Tantangan ketenagakerjaan di Indonesia berasal dari terbatasnya kapasitas perekonomian dalam menyerap angkatan kerja yang terus bertambah, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dan pembangunan masih belum optimal. Selain itu, kelangkaan kesempatan kerja membuat individu siap memasuki pasar kerja dengan berbagai alternatif pilihan. (Malik N., 2018) Sumber utama permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia antara lain:

a. Populasi dan Tenaga Kerja

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan pasokan tenaga kerja. Permasalahan yang terus terjadi di Indonesia adalah pesatnya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

b. Peluang Kerja

Kesempatan kerja dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: pekerjaan formal, pekerjaan informal di luar pekerja keluarga, dan kesempatan kerja tambahan. Analisis terhadap pencapaian pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa angkatan kerja tidak tersebar secara merata. Secara umum dianggap bahwa peluang kerja yang paling besar terkonsentrasi di kota-kota besar, yang menampung banyak perusahaan dan industri besar, sementara kota-kota kecil dan daerah pedesaan mengalami kelangkaan pilihan pekerjaan.

c. Produktivitas Tenaga Kerja



Tantangan peningkatan kesempatan kerja dalam kerangka pembangunan Indonesia pada dasarnya berkaitan dengan permasalahan produktivitas pekerja, khususnya efektivitas kesempatan kerja yang tersedia. Selain itu, jam kerja yang relatif rendah berkorelasi dengan pendapatan pekerja, dengan rata-rata jam kerja di sektor pertanian kurang dari 35 jam per minggu, sedangkan jam kerja di sektor industri dan jasa seringkali melebihi 45 jam. Apabila dilakukan evaluasi pendapatan pekerja berdasarkan Persyaratan Fisik Minimum (KFM), terlihat bahwa sebagian besar pekerja memperoleh upah di bawah KFM sehingga dapat dikategorikan sebagai pekerja miskin. Perpanjangan jam kerja di sektor industri dikaitkan dengan rendahnya upah sehingga memaksa pekerja untuk memperpanjang jam kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang layak untuk meningkatkan output (produktivitas) di sektor industri mungkin melibatkan pengurangan tenaga kerja sekaligus menambah jam kerja.

KESIMPULAN

Populasi mencakup berbagai faktor termasuk kuantitas, komposisi, distribusi usia, jenis kelamin, afiliasi agama, angka kelahiran, tren pernikahan, statistik kehamilan, angka kematian, distribusi geografis, mobilitas, kualitas hidup, dan ketahanan, yang semuanya saling berhubungan dengan politik, ekonomi, dimensi, sosial, dan budaya. Data mengenai jumlah penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif. Lapangan kerja memainkan peran penting dalam perekonomian karena secara intrinsik terkait dengan produktivitas, perolehan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Istilah pekerjaan mengacu pada individu dalam usia kerja yang siap bekerja, yang mencakup mereka yang saat ini bekerja, pencari kerja, pelajar, dan individu yang melakukan tanggung jawab rumah tangga. Statistik ketenagakerjaan sangat penting untuk memahami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan suatu proses yang disengaja dan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini berfungsi sebagai cerminan dampak kebijakan pembangunan, khususnya di sektor perekonomian. Ilmu ekonomi, sebagai suatu disiplin ilmu, berupaya mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mengidentifikasi strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga memfasilitasi kemajuan ekonomi yang lebih cepat. Pembangunan mengacu pada upaya komprehensif yang bertujuan untuk mencapai transformasi sosial yang signifikan, mentransisikan suatu bangsa dari kondisi saat ini ke kondisi yang lebih baik.

Berbagai faktor mempengaruhi distribusi pendapatan, sehingga menyebabkan perbedaan jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga dalam jangka waktu tertentu, yang selanjutnya dapat mempengaruhi aset bersih mereka. Menurut Case dan Fair, pendapatan seseorang terutama berasal dari tiga sumber: upah atau gaji yang diperoleh sebagai kompensasi tenaga kerja, pendapatan yang dihasilkan dari hak milik, dan kesenjangan ekonomi yang ada dalam suatu populasi. Peningkatan kualitas penduduk dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan, menjadi bukti keberhasilan pembangunan dan sebagai indikator kemajuan masyarakat atau nasional. Kriteria untuk menilai kualitas penduduk terus berkembang dan dianggap sebagai cerminan komprehensif dari kemajuan



suatu masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan, data kependudukan sangatlah penting.

Tenaga kerja memainkan peran penting dalam proses produksi, sering kali dianggap lebih penting daripada bahan mentah, sumber daya alam, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi. Di Indonesia, tantangan ketenagakerjaan berasal dari terbatasnya kapasitas perekonomian dalam menyerap angkatan kerja yang terus bertambah, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dan pembangunan belum optimal. Selain itu, kelangkaan kesempatan kerja memberikan individu yang mencari pekerjaan pada beberapa pilihan alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, A. B., Imaniah, S., Rulita Sari, P. D., Hidayat, A., Aziz, D. T., & Noviarita, H. (2021). Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Dalam Pembangunan. *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 2(1), 37–43. <https://doi.org/10.57084/bej.v2i1.1013>
- CENDEKIA Jaya, P. J., & Harjanto, T. (2021). Kebijakan Kependudukan Dan Pertumbuhan Ekonomi. *CENDEKIA Jaya*, 3(1), 39–59. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i1.126>
- Gatiningsih dan Sutrisno, E. (2017). Kependudukan dan Ketenagakerjaan. In *Modul mata kuliah*. [http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku GATI dan EKO Kependudukan LENGKAP.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku_GATI_dan_EKO_Kependudukan LENGKAP.pdf)
- Heni Noviarita dkk. (2021). Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga dan Pelatihan Kewirausahaan Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1192–1198. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2329>
- Ifan Arbiansa, H. N. (2008). PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah ...*, 0721, 780887.
- Indriani, M. (2016). Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal. *Gema Keadilan*, Vol. 3, No, Pp. 74-85. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>
- Kisno. (2021). *Perekonomian Indonesia*. Guepedia.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 95–112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071>
- Malik, N. (2018). *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Nursani, I. I., Bahari, M. F., & Syifan, K. N. (2024). *PREDIKSI K EPENDUDUKAN DAN K ETENAGAKERJAAN K ABUPATEN K UDUS T AHUN 2023*. 2, 71–85.
- Pranadji, T., Sumaryanto, & Gunawan, E. (2013). Population, agriculture, labor, and unemployment threat in the development. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(2), 89–106.
- Retno Setyowati, Mujahidatul Musfiroh, & Najib. (2019). The Opportunities and Challenges of Central Java Province Facing Demographic Bonus and Creation of Gold Generation: Study of Education Aspects, Health, Employment, Population Data 2018. *Urnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7(2), 67–73.



Seran, S. (2023). Penduduk dan Ketenagakerjaan Versus Pembangunan Ekonomi. PT Pusat Literasi Dunia.

Utami, V. R., Maharani, R., Aziza, V., Hariyani, W., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2021). *Analisis peranan bappeda dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur daerah.*